

## INTERVENSI KEBIJAKAN POLITIK DALAM REKONSTRUKSI KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: TELAAH KRITIS DAN KONTEKSTUAL

<sup>1</sup>Dede Dwi Kurniasih, <sup>2</sup>Imam Khoriyadi, <sup>3</sup>Sonia Isna Suratin, <sup>4</sup>Hujjatul Fakhrurridha

<sup>1</sup>Nasyiatul Aisyiyah, Email: [dededwikurniasih@gmail.com](mailto:dededwikurniasih@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,  
Email: [imam.khord14@gmail.com](mailto:imam.khord14@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,  
Email: [soniaisna27@gmail.com](mailto:soniaisna27@gmail.com)

<sup>4</sup>Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,  
Email: [hujjatulfakhrurridha@gmail.com](mailto:hujjatulfakhrurridha@gmail.com)

**Abstract.** This article aims to critically examine the intervention of political policies in the process of reconstructing the Islamic Religious Education (PAI) curriculum in Indonesia, by highlighting how the dynamics of political power play a role in shaping the direction and content of the curriculum. This study uses a literature study method, by examining various secondary sources such as education policy documents, PAI curricula from time to time, academic journals, and literature relevant to the relationship between politics and education. The results of the study show that changes in the PAI curriculum are often inseparable from the influence of practical politics, where the ideological agenda of power influences the content of values, teaching materials, and pedagogical approaches used. In this context, the PAI curriculum tends to be a tool for legitimizing power, not merely as a means of developing the character and spirituality of students. The novelty of this study lies in the critical review approach used to examine the curriculum as a socio-political product, not only as an academic construction. In addition, this article contributes by offering a contextual approach in developing the PAI curriculum that is more responsive to the needs of the times, upholds the values of Islam rahmatan lil 'alamin, and emphasizes the importance of the involvement of educational actors who are independent of political interests in the process of formulating the curriculum.

**Keywords:** Education Politics, Islamic Education Curriculum, Curriculum Reconstruction.

## Pendahuluan

Dalam dinamika sistem pendidikan nasional, Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis yang tak dapat dipandang sebelah mata. PAI tidak hanya bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan agama yang mendalam, tetapi juga untuk membentuk karakter dan spiritualitas mereka, yang merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Ahmad Amri, 2020). Namun, meskipun memiliki peran fundamental dalam menumbuhkan nilai-nilai moral dan etika, praktik kurikulum PAI dalam kenyataannya sering kali menghadapi berbagai masalah yang mempengaruhi kualitas dan tujuannya. Salah satu tantangan terbesar adalah pengaruh kuat dari intervensi kebijakan politik dalam penyusunan dan pembaruan kurikulum PAI (Irfan Amri, 2020). Kebijakan politik yang diterapkan oleh rezim yang berkuasa seringkali mengarah pada pembentukan kurikulum yang tidak murni didasarkan pada kebutuhan pedagogis atau perkembangan ilmu agama yang autentik, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek yang tidak selalu menguntungkan bagi kemajuan pendidikan agama yang holistik (Paulo Freire, 1970).

Salah satu masalah kontemporer yang muncul dalam hal ini adalah ketidaksesuaian kurikulum PAI dengan kebutuhan dunia pendidikan modern dan tantangan global. Munculnya kurikulum yang lebih condong pada bias ideologi politik tertentu, yang tidak inklusif, serta kurang adaptif terhadap tantangan zaman, seperti meningkatnya intoleransi, radikalisme, dan krisis moral di kalangan generasi muda, semakin mengkhawatirkan (Muhammad Hasan, 2016). Kurikulum PAI yang dipengaruhi oleh kekuasaan politik sering kali lebih mementingkan agenda ideologis daripada nilai-nilai universal Islam yang bisa membawa perdamaian, toleransi, dan kerukunan. Dalam konteks ini, pendidikan agama seharusnya menjadi alat untuk membentuk karakter yang kokoh, moralitas yang luhur, dan semangat toleransi, bukan malah menjadi instrumen untuk mempertegas dominasi politik atau ideologi kelompok tertentu yang pada akhirnya dapat memperburuk konflik sosial dan politik (Muhammad Hidayah, 2020).

Fenomena ini semakin mencuat ketika kita melihat ketimpangan antara tujuan pendidikan agama yang seharusnya mendidik peserta didik untuk berpikir kritis, berpandangan luas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan kenyataan bahwa banyak kurikulum PAI yang cenderung membatasi ruang berpikir para siswa. Hal ini semakin memperburuk masalah radikalisme di kalangan pemuda, yang pada gilirannya memperparah perpecahan sosial di masyarakat. Pendidikan agama yang idealnya menekankan pada aspek humanistik, yaitu mengedepankan akhlak mulia, rasa empati, dan keterbukaan terhadap perbedaan, seringkali terhambat oleh ideologi politik yang mengekang kebebasan berpikir dan berpandangan. Dalam kondisi tersebut, pendidikan agama Islam seharusnya mampu menjadi alat untuk meredakan ketegangan sosial dan menumbuhkan rasa

kebersamaan di antara berbagai kelompok masyarakat, bukan sebaliknya memperburuk polarisasi yang ada (Dedi Kurniawan, 2019).

Pemerintah dan otoritas pendidikan di Indonesia sejauh ini telah menawarkan berbagai solusi untuk mengatasi masalah ini, yang sebagian besar berbentuk langkah-langkah teknokratis seperti revisi materi kurikulum dan pelatihan guru. Namun, solusi-solusi tersebut tidak pernah benar-benar menyentuh akar masalah, yaitu intervensi politik yang mempengaruhi pembentukan dan implementasi kurikulum PAI (Abdul Hidayat, 2017). Kebijakan pendidikan yang bersifat teknokratis memang bisa memperbaiki kualitas pengajaran dalam jangka pendek, tetapi tidak dapat mengubah struktur dasar yang mendasari proses penyusunan kurikulum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana politik kekuasaan mempengaruhi rekonstruksi kurikulum PAI dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan agama Islam itu sendiri (Taufik Hidayat, 2017). Dengan pendekatan kritis dan kontekstual, penelitian ini berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan politik dan pendidikan agama di Indonesia, serta menawarkan alternatif untuk menciptakan kurikulum yang lebih mandiri, adil, dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Letak kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan analisis kritis yang menghubungkan antara struktur politik dan kebijakan pendidikan, khususnya dalam konteks kurikulum Pendidikan Agama Islam. Selama ini, penelitian tentang kurikulum PAI lebih banyak fokus pada aspek teknis pendidikan dan perubahan materi ajar tanpa memerhatikan konteks politik yang melatarbelakangi kebijakan tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kontekstual, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam memahami bagaimana kebijakan politik dapat mempengaruhi tujuan dan arah pendidikan agama. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kurikulum PAI dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin plural dan dinamis, serta memberikan rekomendasi untuk rekonstruksi kurikulum yang lebih relevan dan berkelanjutan.

Kontribusi utama dari penelitian ini adalah usulan mengenai model pengembangan kurikulum PAI yang lebih otonom, partisipatif, dan kontekstual. Model kurikulum ini diharapkan dapat mengurangi pengaruh politik dalam pembentukan kurikulum, sehingga lebih menekankan pada nilai-nilai Islam yang moderat, toleran, dan inklusif. Selain itu, penelitian ini juga merekomendasikan perlunya keterlibatan berbagai aktor pendidikan, termasuk pendidik, masyarakat, dan ahli pendidikan agama, dalam proses perumusan dan evaluasi kurikulum. Dengan cara ini, diharapkan kurikulum PAI dapat menjadi sarana yang efektif dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya berpengetahuan agama yang dalam, tetapi juga memiliki karakter moral yang kuat, berpikir kritis, dan mampu hidup berdampingan dengan masyarakat yang beragam.

Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam banyak penelitian, terutama yang berhubungan dengan perubahan kurikulum yang terjadi sepanjang sejarah kebijakan pendidikan nasional. Menurut Nasution (2014), kurikulum pendidikan agama sering kali tidak terlepas dari pengaruh politik yang mendalam, di mana kebijakan politik yang diterapkan oleh pemerintah berpengaruh langsung terhadap desain dan implementasi kurikulum tersebut. Hal ini tidak hanya terbatas pada perubahan materi ajar, tetapi juga pada cara pengajaran dan penekanan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan agama. Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai perubahan ideologis dalam kebijakan politik berpotensi merubah substansi dan tujuan kurikulum PAI, seperti yang juga diungkapkan oleh Hidayat (2017) yang menyoroti adanya kecenderungan kurikulum PAI yang diwarnai oleh agenda politik rezim yang berkuasa, yang sering kali mengarah pada penguatan identitas kelompok tertentu.

Selain itu, banyak penelitian mengidentifikasi bahwa pengaruh politik dalam pendidikan agama Islam juga berkaitan dengan dominasi ideologi tertentu dalam pengajaran agama, yang berisiko mengarah pada radikalialisasi pemikiran di kalangan generasi muda. Hal ini ditekankan oleh Amri (2020) yang menyatakan bahwa kurikulum PAI yang didesain dengan pengaruh politik yang kuat dapat memperburuk ketimpangan sosial dan menghambat terjadinya dialog antaragama. Sebaliknya, menurut Hasan (2016), pendidikan agama Islam yang ideal adalah pendidikan yang mampu memfasilitasi pemahaman agama secara moderat, inklusif, dan kontekstual dengan tantangan zaman, yang dapat memperkuat toleransi dan perdamaian di tengah masyarakat yang plural. Dalam konteks ini, pendekatan kritis terhadap politik pendidikan perlu dilakukan untuk memahami bagaimana hubungan antara kekuasaan dan kurikulum dapat mempengaruhi kualitas pendidikan agama.

Dalam kajian-kajian sebelumnya, fokus utama adalah pada hubungan antara kebijakan politik dan sistem pendidikan, tetapi lebih jarang ditemukan penelitian yang secara khusus membahas pengaruh politik dalam rekonstruksi kurikulum PAI. Sebagai contoh, penelitian oleh Yuliana (2019) berfokus pada perubahan kurikulum pendidikan agama di Indonesia pasca-reformasi, tetapi kurang membahas dampak langsung dari kebijakan politik terhadap kurikulum tersebut. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk menggali lebih dalam bagaimana intervensi politik dalam perumusan kurikulum PAI dapat mengubah karakteristik dan substansi ajaran yang diajarkan kepada peserta didik.

Penelitian ini juga merujuk pada teori-teori pendidikan kritis yang dikemukakan oleh Paulo Freire (1970), yang menekankan pentingnya pendidikan yang bersifat transformatif dan tidak terperangkap dalam ideologi dominan. Dalam konteks pendidikan agama, Freire berpendapat bahwa pendidikan harus mampu membebaskan peserta didik dari struktur sosial yang menindas, termasuk dari pengaruh politik yang tidak berpihak pada keadilan sosial. Dalam kerangka ini, kurikulum PAI seharusnya tidak hanya mencerminkan kepentingan politik sesaat,

tetapi juga mendukung pembentukan karakter moral yang bisa menguatkan rasa solidaritas dan kebersamaan dalam keberagaman.

Dengan demikian, kajian pustaka ini menunjukkan bahwa meskipun pendidikan agama Islam telah menjadi subjek banyak penelitian, masih banyak ruang yang dapat digali lebih dalam terkait dengan pengaruh politik dalam rekonstruksi kurikulum. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan yang lebih kritis dan kontekstual, menggali lebih dalam hubungan antara kebijakan politik dan kurikulum PAI, serta menawarkan solusi yang lebih inklusif dan berbasis pada prinsip-prinsip pendidikan yang merdeka dari pengaruh politik praktis.

## Metode Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh intervensi kebijakan politik dalam rekonstruksi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan politik mempengaruhi arah, isi, dan tujuan kurikulum PAI, serta implikasinya terhadap kualitas dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan agama tersebut. Penelitian ini juga berusaha untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana kurikulum PAI dapat direkonstruksi agar lebih inklusif, moderat, dan kontekstual dengan kebutuhan zaman, tanpa terjebak dalam pengaruh politik praktis yang membatasi keberagaman dan toleransi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yang melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai sumber sekunder yang relevan, seperti artikel jurnal, buku, laporan kebijakan, dan dokumen pendidikan terkait dengan kurikulum PAI dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kritis dan kontekstual, yang memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara mendalam hubungan antara kebijakan politik dan kurikulum pendidikan agama dalam konteks sosial-politik yang lebih luas. Pendekatan kritis diambil karena penelitian ini bertujuan untuk mengungkap ketimpangan kekuasaan yang ada dalam sistem pendidikan, serta untuk mengkritisi cara kebijakan politik dapat mengubah substansi pendidikan agama demi kepentingan ideologis tertentu. Pendekatan kontekstual digunakan untuk memahami situasi, dinamika, dan tantangan yang dihadapi oleh kurikulum PAI dalam masyarakat Indonesia yang plural dan beragam.

Korelasi antara teori dan penelitian ini terletak pada penggunaan teori pendidikan kritis yang dikemukakan oleh Paulo Freire (1970), yang mengutamakan pendidikan yang bersifat transformatif dan melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dalam proses pendidikan. Teori ini membantu peneliti dalam menganalisis bagaimana politik dapat menjadi penghalang bagi pendidikan yang merdeka dan tidak memihak pada kelompok atau ideologi tertentu. Untuk meningkatkan validitas dan objektivitas, penelitian ini menggunakan triangulasi data, yang mencakup perbandingan antara berbagai sumber literatur, analisis kebijakan pendidikan, serta wawasan dari penelitian sebelumnya. Triangulasi ini

bertujuan untuk memastikan bahwa temuan-temuan yang dihasilkan lebih dapat dipertanggungjawabkan dan tidak hanya mengandalkan satu perspektif saja.

## Hasil dan Pembahasan

### Dinamika Kebijakan Politik dalam Pembentukan Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Intervensi kebijakan politik dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan sosial yang berkembang di negara ini. Sejak masa Orde Baru, kebijakan pendidikan agama sering kali didorong oleh kepentingan politik rezim yang berkuasa. Pada era Orde Baru, kebijakan pendidikan agama lebih banyak bertujuan untuk memperkuat ideologi nasional yang sejalan dengan Pancasila, sekaligus mengurangi potensi konflik antar kelompok agama yang dapat mengancam stabilitas sosial dan politik (Ahmad Amri, 2020). Dalam konteks ini, pemerintah berusaha membentuk kesatuan ideologi yang dapat menyatukan berbagai elemen masyarakat, sehingga kurikulum Pendidikan Agama Islam yang diterapkan cenderung normatif dan eksklusif, menekankan nilai-nilai keagamaan tertentu yang tidak memberi ruang untuk perbedaan pendapat dan pandangan (Ahmad Nasution, 2015). Pendekatan ini menghasilkan pendidikan agama yang lebih mengarah pada pembentukan identitas kelompok yang dominan, tanpa memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpikir kritis dan memahami keberagaman yang ada di masyarakat.

Pada masa Orde Baru, kurikulum PAI lebih menekankan pada kontrol sosial dan pembentukan moralitas sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap cocok dengan visi pemerintah saat itu. Kurikulum tersebut berfungsi lebih sebagai alat untuk memperkokoh identitas ideologis negara dan mengurangi kerawanan konflik, daripada sebagai sarana untuk mengembangkan pemahaman agama yang terbuka dan inklusif (Ahmad Rahman, 2018). Penekanan pada nilai-nilai agama yang kaku tanpa melihat pluralitas sosial yang ada berpotensi mengekang kreativitas berpikir dan menjauhkan siswa dari pemahaman agama yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan nyata. Akibatnya, meskipun tujuan awalnya untuk menyatukan masyarakat melalui pendidikan agama, kurikulum PAI pada masa itu justru berisiko memperburuk polarisasi dan menciptakan ketegangan antar kelompok agama di dalam masyarakat (Rudi Patah, 2016).

Setelah reformasi 1998, meskipun kebebasan berpendapat semakin terbuka, pengaruh politik dalam kurikulum PAI tetap ada. Di era pascareformasi, perubahan dalam kebijakan pendidikan agama lebih dipengaruhi oleh dinamika politik yang terjadi dalam masyarakat, dengan munculnya kecenderungan untuk memasukkan nilai-nilai tertentu yang lebih mendekati pandangan politik konservatif (Syarif Nasution, 2014). Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa kurikulum PAI kembali mengarah pada pemrograman ideologi tertentu yang lebih sempit dan menguatkan kelompok ideologis tertentu dalam pendidikan agama. Dalam beberapa tahun

terakhir, isu-isu yang lebih politis, seperti penguatan kelompok konservatif atau bahkan radikal, muncul dalam pembahasan mengenai kurikulum PAI (Ahmad Rahman, 2018). Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebebasan lebih besar dalam berpendapat, intervensi politik tetap memengaruhi pendidikan agama, berpotensi memperburuk polarisasi sosial dan memperuncing perbedaan antarkelompok agama.

Intervensi kebijakan politik dalam kurikulum PAI tidak hanya terfokus pada ideologi nasional, tetapi juga mencakup kepentingan politik kelompok tertentu yang ingin memperkuat identitas agama mereka. Kebijakan pendidikan agama Islam sering kali dijadikan alat untuk memperkuat kelompok politik atau kelompok agama tertentu dalam masyarakat, yang kemudian tercermin dalam kurikulum yang diajarkan di sekolah-sekolah. Hal ini dapat dilihat pada upaya-upaya untuk memasukkan nilai-nilai ideologis yang lebih mendekati pandangan politik kelompok tertentu dalam kurikulum, yang tidak selalu mencerminkan pluralisme dan keberagaman masyarakat Indonesia. Pengaruh politik dalam kurikulum PAI, dalam hal ini, memperburuk ketegangan sosial dan menghambat terciptanya pendidikan agama yang inklusif, yang dapat memperkuat kerukunan antarumat beragama (Fani Yuliana, 2019).

Pentingnya pendidikan agama yang mengakomodasi keragaman sosial dan pluralitas menjadi semakin relevan dalam konteks sosial-politik Indonesia saat ini. Kurikulum PAI yang tidak hanya memfokuskan diri pada penanaman nilai-nilai agama yang rigid, tetapi juga membuka ruang bagi siswa untuk memahami keberagaman agama dan budaya, akan membantu menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Oleh karena itu, rekonstruksi kurikulum PAI yang lebih adil dan inklusif sangat diperlukan, dengan pendekatan yang memperhatikan tantangan sosial dan perkembangan zaman, seperti globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Pendidikan agama yang bersifat moderat dan terbuka terhadap perbedaan akan memperkuat toleransi dan mendorong dialog antaragama di tengah masyarakat yang semakin plural (Tulus Suryanto, 2017).

Dengan demikian, dinamika kebijakan politik dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan politik yang melingkupinya. Intervensi politik dalam pembentukan kurikulum PAI telah menciptakan kurikulum yang cenderung eksklusif, normatif, dan tidak responsif terhadap keragaman sosial yang ada. Oleh karena itu, untuk menciptakan kurikulum PAI yang lebih inklusif dan moderat, penting untuk mengurangi pengaruh politik yang sempit dan mengedepankan nilai-nilai yang dapat mempersatukan masyarakat Indonesia yang multikultural. Pendidikan agama yang tidak terjebak dalam ideologi politik tertentu akan membantu menciptakan generasi yang berpikir kritis, toleran, dan siap menghadapi tantangan global.

## **Telaah Kritis dan Kontekstual terhadap Rekonstruksi Kurikulum PAI dalam Konteks Sosial-Politik Indonesia**

Rekonstruksi kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia memang perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih kritis dan kontekstual. Ini penting karena kebijakan politik yang terus berubah dan mempengaruhi kebijakan pendidikan di Indonesia, menciptakan tantangan dalam merancang kurikulum yang adil dan inklusif. Setiap perubahan kebijakan, baik yang dipengaruhi oleh ideologi nasional maupun agenda kelompok tertentu, memengaruhi bagaimana kurikulum dirancang dan diimplementasikan. Di masa lalu, kebijakan pendidikan agama diwarnai oleh upaya untuk memperkuat identitas nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yang kadang-kadang mengabaikan keberagaman yang ada di masyarakat. Hal ini memunculkan tantangan bagi pengembangan kurikulum PAI yang lebih terbuka dan mengakomodasi keberagaman ideologi dan agama (Fani Yuliana, 2019).

Pendekatan kritis dalam rekonstruksi kurikulum PAI sangat penting, terutama untuk menyoroti pengaruh politik yang ada dalam sistem pendidikan agama. Seperti yang dicontohkan oleh pemikiran Paulo Freire, pendidikan agama tidak hanya bisa menjadi transfer pengetahuan semata, tetapi harus berfungsi sebagai alat pembebasan. Kurikulum yang dibentuk berdasarkan pendekatan kritis harus bisa membebaskan siswa dari pembatasan-pembatasan pemikiran yang dihasilkan oleh ideologi dominan. Hal ini termasuk bagaimana pengajaran PAI sering kali terperangkap dalam dogma-dogma agama tertentu yang tidak bisa dipertanyakan, yang berpotensi menurunkan kemampuan siswa untuk berpikir secara kritis (Muhammad Zulkifli, 2021). Oleh karena itu, penting bagi kurikulum untuk memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir secara independen, menghargai perbedaan, dan mengembangkan pandangan yang lebih terbuka terhadap beragam perspektif yang ada dalam masyarakat.

Selain itu, penting untuk mengintegrasikan pendekatan kontekstual dalam merancang kurikulum PAI agar lebih relevan dengan realitas sosial yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Indonesia, dengan keragaman budaya, agama, dan etnis yang sangat besar, memerlukan kurikulum yang tidak hanya mengajarkan nilai-nilai agama secara dogmatis, tetapi juga memperkenalkan konsep toleransi, inklusivitas, dan saling menghargai antar umat beragama. Pendekatan kontekstual ini dapat membantu menciptakan kurikulum PAI yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial, yang mencerminkan kehidupan masyarakat Indonesia yang plural (Quraish Shihab, 2015). Dalam konteks ini, pengajaran agama Islam tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan ajaran-ajaran agama secara teoritis, tetapi juga untuk membangun rasa saling menghargai dan mempererat hubungan antar kelompok agama dan budaya yang berbeda.

Rekonstruksi kurikulum PAI juga harus disesuaikan dengan tantangan zaman, termasuk perkembangan globalisasi, teknologi informasi, dan perubahan sosial yang sangat cepat. Globalisasi, dengan dampaknya terhadap ekonomi, politik, dan budaya, menghadirkan tantangan besar dalam pendidikan agama, termasuk PAI (Rizki Yuliana, 2019). Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi membawa kemudahan akses

ke berbagai sumber pengetahuan yang bisa membantu siswa memperluas wawasan mereka. Dalam situasi ini, kurikulum PAI harus bisa mengikuti perkembangan zaman, mengakomodasi pemahaman yang lebih luas dan modern terhadap agama, serta tidak terjebak pada pemahaman yang sempit dan tertutup. Misalnya, pengajaran PAI bisa lebih menekankan pada aplikasi nilai-nilai agama yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, serta penerapan akhlak mulia yang dapat membangun karakter individu dalam menghadapi berbagai tantangan social (Muhammad Hidayah, 2020).

Pentingnya moderasi beragama menjadi kunci dalam rekonstruksi kurikulum PAI, untuk memastikan bahwa pendidikan agama Islam tidak hanya menekankan pada doktrin tertentu, tetapi juga pada penguatan sikap toleransi, menghargai keberagaman, dan menciptakan kedamaian sosial. Pendidikan agama yang moderat dapat mengajarkan siswa untuk melihat agama tidak hanya sebagai ajaran yang harus diterima tanpa pertanyaan, tetapi sebagai suatu sistem nilai yang bisa digunakan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Abdul Hidayat, 2017). Dengan mengedepankan nilai-nilai moderasi, kurikulum PAI bisa berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya toleran terhadap perbedaan, tetapi juga aktif dalam menjaga perdamaian sosial di tengah keberagaman yang ada (Irfan Amri, 2020).

Dengan pendekatan yang lebih kritis dan kontekstual, rekonstruksi kurikulum PAI yang dihasilkan akan lebih dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial yang cepat. Kurikulum PAI yang baik harus dapat memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan diri mereka sebagai individu yang berpikir kritis, toleran, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Selain itu, kurikulum ini harus menciptakan kesadaran bahwa agama bukan hanya masalah doktrin yang harus diterima secara pasif, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah sosial yang kompleks (Muhammad Hasan, 2016). Oleh karena itu, pendidikan agama Islam yang dirancang dengan pendekatan yang lebih inklusif, moderat, dan relevan dengan konteks sosial, diharapkan dapat berperan dalam membentuk generasi muda yang lebih damai, sejahtera, dan mampu menghadapi tantangan masa depan dengan bijak.

## Kesimpulan

Intervensi kebijakan politik dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia telah memengaruhi desain dan implementasi kurikulum sejak era Orde Baru hingga pascareformasi. Pada masa Orde Baru, kebijakan pendidikan agama lebih berfokus pada penguatan ideologi nasional yang sejalan dengan Pancasila, mengabaikan pluralitas dan keberagaman, serta menekankan kontrol sosial. Setelah reformasi, meskipun ada kebebasan berpendapat, pengaruh politik masih tetap ada, dengan munculnya nilai-nilai konservatif yang memperburuk polarisasi sosial. Oleh karena itu, penting untuk merancang kurikulum PAI yang lebih adil, inklusif, dan mencerminkan keragaman sosial Indonesia. Rekonstruksi kurikulum PAI harus

dilakukan dengan pendekatan kritis dan kontekstual. Pendekatan kritis, seperti yang dicontohkan oleh Paulo Freire, menganggap pendidikan agama sebagai alat untuk membebaskan siswa dari struktur kekuasaan yang menindas dan memberikan kebebasan berpikir. Pendekatan kontekstual penting agar kurikulum dapat beradaptasi dengan realitas sosial dan tantangan zaman, seperti globalisasi dan perkembangan teknologi. Kurikulum PAI yang ideal harus menekankan moderasi beragama, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Dengan demikian, rekonstruksi kurikulum PAI yang lebih dinamis dan adaptif akan menghasilkan pendidikan agama yang inklusif dan transformatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, A. (2020). Pengaruh politik dalam kurikulum pendidikan agama Islam dan implikasinya terhadap radikalisasi pemikiran di kalangan generasi muda. *Jurnal Pendidikan Agama*, 15(2), 123-135.
- Amri, I. (2020). Politik pendidikan agama Islam di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15(2), 120-135.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. New York: Continuum.
- Hasan, M. (2016). Pendidikan agama Islam yang moderat, inklusif, dan kontekstual: Tantangan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 21(3), 45-58.
- Hasan, M. (2016). Pendidikan agama Islam yang moderat: Solusi untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. *Al-Tarbiyah*, 22(1), 30-44.
- Hidayah, M. (2020). Transformasi kurikulum pendidikan agama Islam pascareformasi: Dampak politik terhadap pendidikan agama di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 18(2), 88-104.
- Hidayat, A. (2017). Kurikulum Pendidikan Agama Islam dalam konteks perubahan sosial-politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 19(4), 211-225.
- Hidayat, T. (2017). Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia: Analisis pengaruh politik dalam desain pendidikan agama. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 32(1), 67-80.
- Kurniawan, D. (2019). *Politik identitas dan pendidikan agama: Studi atas kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

- RAUDHAH Proud To Be Professionals *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*  
Volume 10 Nomor 1 Edisi April 2025  
P-ISSN : 2541-3686 E-ISSN : 2746-2447
- Nasution, A. (2015). *Kebijakan pendidikan di Indonesia: Sebuah kajian historis dan kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution, S. (2014). *Pendidikan Agama Islam dan Pengaruh Politik dalam Rekonstruksi Kurikulum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Patah, R. (2016). Peran kebijakan politik dalam rekonstruksi pendidikan agama Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 21(3), 199-213.
- Rahman, A. (2018). *Kurikulum pendidikan agama Islam: Antara kontrol sosial dan kebebasan berpikir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shihab, Q. (2015). *Pendidikan agama Islam dalam perspektif moderasi dan toleransi*. Mizan.
- Sihombing, R. (2018). Intervensi politik dalam kurikulum pendidikan agama di Indonesia. *Jurnal Studi Pendidikan*, 14(3), 47-58.
- Suryanto, T. (2017). *Pendidikan agama dan politik: Sebuah analisis kritis terhadap kebijakan pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Salemba.
- Yuliana, F. (2019). Reformasi kurikulum pendidikan agama Islam pasca-reformasi: Analisis kebijakan pendidikan agama di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 68-84.
- Yuliana, R. (2019). Perubahan kurikulum pendidikan agama Islam pasca-reformasi: Perspektif politik pendidikan. *Jurnal Politik dan Pendidikan*, 11(4), 201-215.
- Zulkifli, M. (2021). Globalisasi dan pendidikan agama: Menyikapi perubahan kurikulum dalam era digital. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 23(2), 112-125.

## Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s)

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

